

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting bagi suatu bangsa dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. SDM merupakan modal dasar pembangunan nasional, sekaligus menjadi salah satu faktor penentu eksistensi bangsa. Guna memenangkan persaingan global yang semakin ketat, selain kompetensi juga diperlukan *soft skill* berupa karakter (*character*) SDM yang baik. Karakter suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menjadi jati diri atau identitas pembeda bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bagi Indonesia sebagai bangsa dengan kondisi masyarakat yang majemuk, diperlukan suatu karakter yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang menjadi falsafah dasar atau ideologi yang diyakini dapat mempersatukan kebhinnekaan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut harus senantiasa ditanam dan ditumbuh kembangkan guna membangun semangat kebangsaan (nasionalisme) bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan, berkaitan erat dengan pembentukan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air merupakan lahan yang subur bagi timbulnya tekad bangsa Indonesia membangun keunggulan dan kekuatannya.

Fakta sejarah menunjukkan, banyak bangsa-bangsa di dunia mengalami pasang-surut. Ada bangsa yang tumbuh semakin besar dan kuat, tetapi tidak sedikit pula diantara bangsa-bangsa tersebut yang semakin surut dan bahkan ada yang akhirnya tinggal nama yang tercatat di dalam sejarah. Faktor utama penyebab surutnya bangsa adalah karena ketidakmampuannya untuk mengelola diri, dan tidak konsisten (taat asas) terhadap kehendak bersama yang sejak semula dijadikan perekat dalam membangun satu kesatuan. Sebaliknya, bangsa yang tetap eksis sejak kelahirannya adalah bangsa yang terbukti mampu mempertahankan jati diri, yaitu

karakter yang mencerminkan kehendak bersamanya (Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2005). Karakter bangsa sekaligus menunjukkan rasa kebangsaan, sebagai unsur penggerak dan pendorong semangat pada setiap individu untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan keutuhannya sebagai satu bangsa.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga tidak luput dari pasang surut. Sejarah mencatat, sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 berbagai cobaan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi berkali-kali, baik dalam bentuk pemberontakan maupun gerakan separatis lainnya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mewujudkan tujuan nasionalnya menemui berbagai halangan dan rintangan. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dari “konsep berbangsa” yang dibangun di atas keberagaman dan kemajemukan. Masalah tersebut antara lain: permasalahan yang terkait dengan pembentukan karakter bangsa; permasalahan yang terkait kesadaran dari seluruh komponen bangsa terhadap system penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang telah disepakati (diatur dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan); penyelenggaraan pemerintahan negara masih diwarnai berbagai kemelut politik yang mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan; dan implementasi system otonomi daerah yang cenderung mendorong munculnya/menguatnya sentiment kedaerahan (Ferrijana et al., 2015). Sangatlah tepat pemerintah menetapkan “revolusi mental” atau “revolusi karakter bangsa” menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan nasional. Revolusi mental ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yang menyebutkan bahwa revolusi mental bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju, dan berpandangan modern serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik.

Salah satu pertimbangan perlunya revolusi mental adalah karena terjadinya krisis identitas, yaitu karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat gotong royong, saling bekerja-sama demi kemajuan bangsa sudah meluntur. Harian Kompas tanggal 16 Desember 2016 membuat judul *headline*-nya "Fondasi Demokrasi Indonesia Goyah", Persatuan dan keadilan yang

menjadi penyokong utama demokrasi di Indonesia tengah menghadapi persoalan serius.

Selain itu, hasil pengukuran Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) Lemhannas RI menunjukkan bahwa Ketahanan Nasional Indonesia tahun 2021 secara agregat masih dalam kondisi kurang tangguh, yaitu dengan nilai 2,55 (dari skala 0 – 5). Kondisi kurang tangguh berarti keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga peringatan (*warning*).

Hasil pengukuran Labkurtanas dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016–2021), dua aspek yang memiliki nilai terendah adalah aspek Ideologi dan Sosial Budaya. Bahkan terjadi kecenderungan penurunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi selama tiga tahun terakhir. Di samping posisinya masih kurang tangguh, indeksnya juga mengalami penurunan, yaitu dari 2,56 pada tahun 2019, menjadi 2,42 pada tahun 2020 dan 2,28 pada tahun 2021. Secara lengkap kondisi Ketahanan Nasional Indonesia selama 6 tahun terakhir, sebagai berikut:

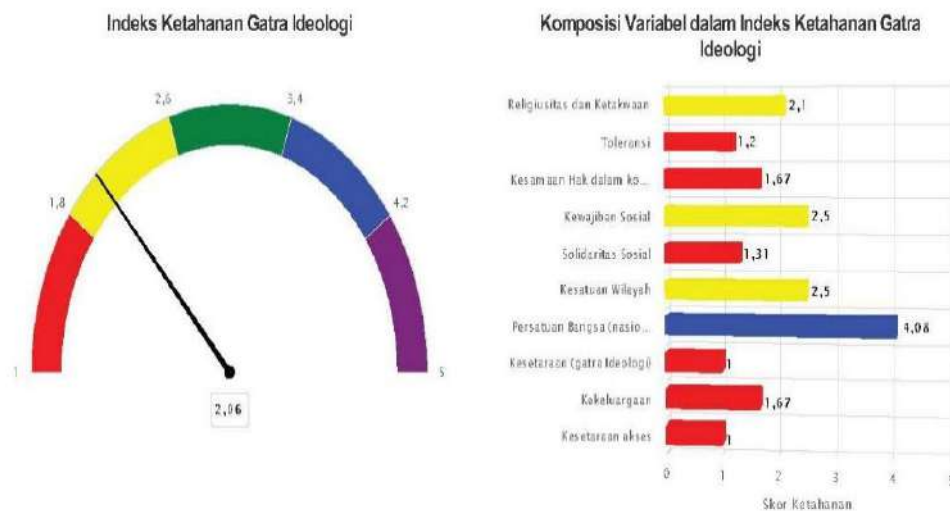
Tabel 1. 1 Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Tahun 2016 – 2021

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AGREGAT NASIONAL	2,60	2,63	2,69	2,82	2,70	2,55
KOMPOSIT :						
1. GEOGRAFI	2,68	2,56	2,73	2,85	2,87	2,63
2. DEMOGRAFI	2,96	3,18	3,32	3,27	2,68	3,37
4. IDEOLOGI	2,06	2,06	2,44	2,56	2,42	2,28
5. POLITIK	2,43	2,43	2,67	2,77	2,78	2,31
6. EKONOMI	2,73	2,76	2,86	2,92	2,65	2,77
7. SOSBUD	2,14	2,16	2,30	2,37	2,70	2,43
8. HANKAM	3,08	3,08	2,79	3,20	3,09	2,52

Sumber: Diolah dari Hasil Pengukuran Labkurtannas – Lemhannas RI (2016-2021)



Rendahnya indeks kondisi ketahanan nasional gatra ideologi ditentukan oleh berbagai faktor, yang tiap daerah tidak selalu sama. Secara nasional, detail hasil pengukuran Labkurtanas untuk gatra Ideologi tahun 2016, sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari Hasil Pengukuran Labkurtannas – Lemhannas RI 2016.

Gambar 1. 1
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2016

Indikator-indikator utama yang menyebabkan posisi gatra Ideologi menjadi kurang tangguh adalah: (a) semakin rendahnya toleransi antar kelompok masyarakat, (b) semakin meningkatnya frekuensi konflik antar kelompok masyarakat, (c) masih rendahnya kesamaan hak dalam kehidupan sosial, (d) masih rendahnya solidaritas sosial dan kekeluargaan. Kondisi tersebut secara akumulatif menyebabkan kondisi Ketahanan Nasional bidang Ideologi dengan nilai 2,06 yang berarti masih "kurang tangguh".

Selain gatra Ideologi, kondisi Ketahanan Nasional Indonesia yang juga kurang tangguh dengan nilai terendah adalah gatra Sosial Budaya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut:



Sumber : Diolah dari Hasil Pengukuran Labkurtanas – Lemhannas RI 2016

Gambar 1. 2

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Tahun 2016

Dari aspek Sosial Budaya, beberapa indikator menunjukkan kondisi yang masih rawan, antara lain: Kerukunan Sosial, Hak-Hak Sipil, Nilai Tradisional dan Universal, Perilaku Sosial, Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek. Kondisi tersebut secara akumulatif menyebabkan kondisi Ketahanan Nasional Indonesia di bidang Sosial dan Budaya menjadi kurang tangguh dengan nilai 2,14.

Hasil pengukuran Labkurtanas tersebut sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Maraknya konflik-konflik sosial baik yang bersifat horizontal maupun vertikal yang tidak saja mengganggu keharmonisan hubungan sosial masyarakat dalam kebhinnekaan, tapi juga berpotensi mengancam integrasi bangsa. Oleh sebab itu, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila yang sekarang menjadi Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemantapan wawasan kebangsaan, salah satunya melalui program pemantapan nilai-nilai kebangsaan merupakan kebutuhan. Berbagai saran masukan telah diterima Lemhannas RI dari masyarakat untuk menghidupkan kembali kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila yang bersifat *massive*, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada masa lalu.

Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah non Kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016, memiliki tugas antara lain:

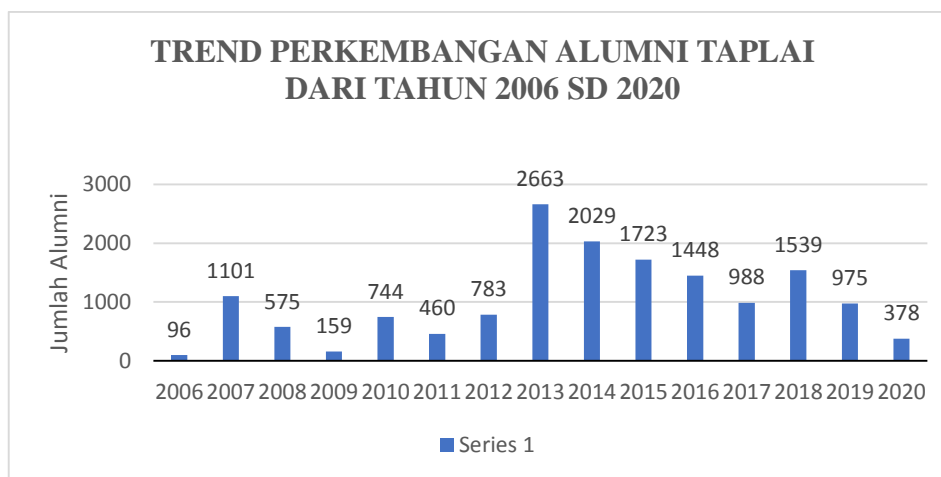
1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.
2. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menyelenggarakan pementapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Dengan demikian, salah satu tugas utama Lemhannas RI adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pementapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Negara Kesatuan republik Indonesia serta nilai-nilai ke-bhineka tunggal ika-an dalam rangka membangun karakter bangsa.

Sehubungan dengan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Perpres tersebut di atas, Lemhannas RI hingga saat ini telah menyelenggarakan program pementapan nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk: (a) Dialog Kebangsaan, (b) Pelatihan Pelatih (*Training of Trainers*), dan (c) Pementapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) kepada tokoh masyarakat, birokrat, akademisi, tokoh politik, pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Sejak tahun 2006, Lemhannas RI telah melaksanakan program pementapan nilai-nilai kebangsaan dengan jumlah alumnus sampai dengan akhir tahun 2020 sejumlah 15.661 orang.

Dalam pelaksanaannya program pemantapan nilai-nilai kebangsaan terjadi pasang surut dan delapan tahun terakhir cenderung semakin menurun sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Alumni Taplai Tahun 2006-2020



Program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhannas RI tersebut diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam membangun karakter bangsa. Untuk itu Lemhannas RI terus berupaya menata kembali kebijakan di berbagai bidang sesuai perannya, termasuk bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan agar tidak hanya berorientasi ke dalam tetapi juga harus berorientasi keluar (*outward looking*). Lemhannas RI berupaya untuk mempersiapkan setiap aspek terkait mulai dari aspek budaya organisasi, administratif, proses pembelajaran dan sumber daya manusianya sebaik mungkin. Dalam hal sumber daya manusia, yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia yang mempunyai efektivitas, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang sesuai dengan tuntutan hidup saat ini dan masa mendatang. Pola pikir yang dibutuhkan adalah pola pikir yang kritis, inovatif dan kreatif yang mengacu pada nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pola sikap yang dibutuhkan adalah memiliki integritas, moral dan etika yang mencerminkan jati diri atau karakter bangsa Indonesia. Pola tindak yang dibutuhkan adalah efektivitas untuk bersikap kompetitif dan adaptif, serta mampu bekerjasama dalam ikatan

jejaring yang mantap dan jelas struktur tugas dan organisasinya sebagai implementasi pola pikir dan pola sikap. Ada keselarasan antara pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

Meskipun sudah dilakukan berbagai bentuk evaluasi namun masih bersifat parsial, sehingga sejak dilaksanakan mulai tahun 2006 belum diperoleh gambaran yang utuh tentang efektifitas dari kegiatan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Efektivitas ini dapat diketahui dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan aspek terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Evaluasi yang dimaksud bukan hanya sekedar penilaian, tetapi evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut berguna untuk menentukan apakah program layak untuk diteruskan, direvisi atau menghentikan program karena dianggap sudah tidak bermanfaat. Evaluasi juga akan mengukur ketercapaian setiap program yang sudah dilaksanakan. Menurut Tayibnapi (2008), evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat (Munthe, 2015).

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan (*stakeholder*), karena berdasarkan hasil evaluasi program ini para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi program merupakan proses identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi kriteria yang kuat untuk menentukan nilai program yang dievaluasi (keberhargaan atau manfaatnya) berdasarkan kriteria tadi. Hasil penentuan keberhargaan atau manfaat program oleh satu evaluator dan oleh evaluator lain bisa jadi berbeda-beda karena mereka gagal mengidentifikasi dan mengklarifikasi alat (kriteria) untuk memutuskan keberhargaan atau manfaat program tersebut. Defenisi ini menekankan penggunaan kriteria yang kuat (Mahmudi, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI, melalui suatu penelitian ilmiah guna melihat

capaian dan efektifitas program tersebut. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan tidak saja bagi pimpinan Lemhannas RI, tapi juga pimpinan lembaga institusi pemerintah lainnya dalam membuat kebijakan terkait dengan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Artinya, perlu ada kesinambungan dari hasil penelitian terhadap perbaikan/pengembangan program atau memberi masukan rekomendasi untuk program selanjutnya (Darmayanti & Wibowo, 2014).

1.2 Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka objek penelitian ini adalah program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari dua program, yaitu: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Untuk Pelatih (*Training of Trainers/ToT*). Adapun pembatasan penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap “Efektifitas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilaksanakan Lemhannas RI”, dengan sub-sub fokus sebagai berikut:

1. Mengevaluasi tentang landasan hukum, mencakup regulasi, tujuan dan sasaran serta kebutuhan masyarakat sebagai aspek "*Context*" Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
2. Mengevaluasi tentang perencanaan proses pemantapan, mencakup pembiayaan/pendanaan, kurikulum, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana sebagai aspek "*Input*" dari Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
3. Mengevaluasi proses pelaksanaan program pemantapan, mencakup pelaksanaan kegiatan pemantapan, kepuasan peserta serta supervisi dan monitoring proses pemantapan sebagai aspek "*Process*" Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
4. Mengevaluasi hasil program pemantapan, mencakup: pencapaian target kelulusan, perubahan perilaku (*behavior*) dan serta dampak (*result*) kegiatan pemantapan sebagai aspek "*Product*" Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI?

Adapun model evaluasi yang digunakan adalah model *context, input, process, dan product* (CIPP), dipadukan dengan model evaluasi Kirkpatrick untuk menguatkan hasil evaluasi perubahan perilaku (*behavior*) dan dampak terhadap peserta sebagai bagian dari aspek produk .

1.3 Pertanyaan Penelitian Atau Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum, mencakup: regulasi, tujuan dan sasaran serta kebutuhan masyarakat sebagai aspek "*Context*" Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI?
2. Bagaimana perencanaan proses pemantapan, mencakup pembiayaan/pendanaan, kurikulum, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana sebagai aspek "*Input*" dari Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program pemantapan, mencakup pelaksanaan kegiatan pemantapan, kepuasan peserta serta supervisi dan monitoring proses pemantapan sebagai aspek "*Process*" Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI?
4. Bagaimana hasil program pemantapan, mencakup: pencapaian target kelulusan, perubahan perilaku (*behavior*) dan serta dampak (*result*) kegiatan pemantapan sebagai aspek "*Product*" Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang valid, reliabel, dan obyektif mengenai kualitas program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi aspek konteks, input, proses, produk dan *outcome* (dampak) yang dirasakan masyarakat dari program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI, untuk selanjutnya dijadikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan serta pengembangan ilmu.

Secara lebih detail, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki landasan hukum program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, mencakup regulasi, tujuan dan sasaran serta kebutuhan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki perencanaan program pemantapan, mencakup pembiayaan program, kualitas kurikulum, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
3. Untuk memperbaiki pelaksanaan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, mencakup pelaksanaan/ pengelolaan, kepuasan peserta serta supervisi dan monitoring program pemantapan.
4. Untuk meningkatkan hasil program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, mencakup target kelulusan, perubahan perilaku (*behavior*) peserta dan dampak atau manfaat yang dirasakan oleh peserta/alumni terhadap hasil pemantapan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis. hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu manajemen dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Resources Management*), khususnya yang terkait dengan pengembangan konsep pembentukan karakter bangsa dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang heterogen.
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbang saran pemikiran bagi kemajuan upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam pembentukan karakter bangsa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi, masukan dan solusi strategis kepada:
 - a. Pimpinan Lemhannas RI dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhannas RI.
 - b. Pimpinan Lembaga/Institusi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan serupa dalam rangka

menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan wawasan kebangsaan masyarakat, termasuk pemantapan ideologi Pancasila.

1.6 Kebaruan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield serta dipadukan dengan model evaluasi Kirkpatrick ini berangkat dari teori, konsep dan beberapa penelitian yang relevan. Pembaharuan (*state of the arts*) dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini secara spesifik mengangkat isu evaluasi Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam upaya memantapkan wawasan kebangsaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan akademisi yang keluarannya diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Penelitian ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan Warga Negara Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa.
3. Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan ini sangat spesifik yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan belum ada penelitian yang komprehensif terhadap program ini sebelumnya.
4. Penelitian ini menggunakan perpaduan model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process and Product*) dengan model evaluasi Kirkpatrick untuk melihat perubahan perilaku (*behavior*) dan dampak (*result*) secara komprehensif yang belum pernah dilakukan di Lemhannas RI.
5. Ditemukannya model konseptual sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI serta dapat dijadikan *raw model* bagi pelaksanaan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan serupa di tempat lainnya.